

IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MENANGANI KEMISKINAN DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Samirah Aulia Putri

NPP. 32.1008

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: samirahputri699@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Baharuddin Thahir, S.sos., M.Si.

ABSTRACT

Problem / Background (GAP): the joint Business Group (Kelompok Usaha Bersama – KUBE) program has not yet been optimally implemented in empowering the economic conditions of the poor in Ambon City, Maluku province **Objective:** This study aims to analyze the implementation of the KUBE Program in addressing poverty in Ambon City. **Method:** The study uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. This research adopts the policy implementation theory of Knill and Tosun, which covers criteria such as effectiveness, efficiency, participation, and determinant factors like control structure and administrative capacity. **Findings / Results:** KUBE contributes to increasing income through small group-based businesses. Supporting factors include local government support and community participation. However, several obstacles remain, such as limited funding, weak monitoring and evaluation, and low public understanding of the program. **Conclusion:** The implementation of KUBE in Ambon City has not yet reached its full potential. Strengthening mentoring, improving inter-agency coordination, and enhancing oversight are needed so that the program can operate more effectively and sustainably in reducing poverty.

Keywords: Poverty, Implementation, Qualitative, Empowerment, Sustainability

ABSTRAK

Permasalahan / Latar Belakang (GAP): Belum optimalnya Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kota Ambon Provinsi Maluku **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program KUBE dalam menangani kemiskinan di Kota Ambon. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Knill dan Tosun, yang mencakup kriteria efektivitas, efisiensi, partisipasi, serta faktor determinan seperti struktur kontrol dan kapasitas administrasi. **Hasil/Temuan:** KUBE berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha kecil berbasis kelompok. Faktor pendukung mencakup dukungan dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Namun, masih ditemukan hambatan seperti keterbatasan anggaran, lemahnya monitoring dan evaluasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program. **Kesimpulan:** Implementasi KUBE di Kota Ambon belum maksimal. Diperlukan penguatan pendampingan,

koordinasi antarinstansi, dan pengawasan agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Implementasi, Kualitatif, Pemberdayaan, Keberlanjutan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan Kesehatan (Hesri et al., 2020). Menurut Bappenas, kemiskinan terjadi saat individu tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya, termasuk akses terhadap air bersih, tempat tinggal layak, pendidikan, pekerjaan, dan layanan Kesehatan (Harahap et al., 2023). Terpenuhinya hak-hak ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Namun, dalam kenyataannya, kemiskinan masih menjadi persoalan serius dan kompleks yang sulit diatasi di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia (Pratama, 2023).

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi oleh banyak negara, terutama negara berkembang (Hariadi, 2024). Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi isu sosial yang signifikan dan belum terselesaikan, bahkan cenderung meningkat seiring krisis multidimensional (Setitit, 2024). Meskipun telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, kenyataannya angka kemiskinan terus bertambah akibat pertumbuhan penduduk, meningkatnya permintaan, dan melemahnya kondisi ekonomi nasional (Burnama, 2024).

Tingkat kemiskinan di Indonesia naik dari 9,22% pada 2019 menjadi 10,19% pada 2020, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta jiwa (BPS, 2024). Tahun 2021 turun menjadi 9,71%, lalu 9,57% pada 2022 dengan 26,36 juta jiwa, dan 9,36% pada 2023 dengan 25,9 juta jiwa (Jayadi, T., & Meilvidiri, 2019). Penurunan ini belum signifikan karena tidak mencapai 1% per tahun. Pemerintah bertanggung jawab menurunkan angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (Al Baihaqqi, R. F. F., Susilowati, E. ., & Nainggolan, 2024).

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan, menyerap tenaga kerja, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin (Arief, 2016). Ketersediaan pekerjaan menjadi indikator penting dalam menurunkan kemiskinan. Semakin banyak penduduk yang bekerja, maka semakin besar peluang mereka keluar dari kemiskinan (Ma'ruf, 2022). Program pemberdayaan sosial dari pemerintah diharapkan mampu mendorong kemandirian masyarakat. Provinsi Maluku menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, bahkan menempati posisi keempat termiskin di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019–2023.

Berdasarkan data BPS Maluku (2024), persentase kemiskinan di Provinsi Maluku mengalami fluktuasi selama 2019–2023. Pada 2019 sebesar 17,69%, turun menjadi 17,44% di 2020, namun naik menjadi 17,87% di 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Tahun 2022 turun signifikan menjadi 15,97%, lalu kembali naik ke 16,42% pada 2023. Kota Ambon juga mengalami perubahan serupa, dari 4,51% di 2020 menjadi 5,02% pada 2021, lalu 4,68% di

2022, dan naik menjadi 5,25% di 2023. Kenaikan ini dipengaruhi oleh inflasi dan dampak ekonomi pascapandemi yang memperburuk daya beli masyarakat.

Penanganan kemiskinan berhasil jika angka kemiskinan turun minimal 1% per tahun, namun Kota Ambon belum mencapai target tersebut. Pada 2019–2023, persentase kemiskinan Kota Ambon berfluktuasi, dari 4,57% (2019) menjadi 5,25% (2023). Penyebab kemiskinan meliputi ketidakmerataan sumber daya, rendahnya pendidikan, diskriminasi, dan akses modal terbatas. Program nasional seperti PKH, Kartu Indonesia Pintar, dan Bantuan Pangan Non-Tunai kurang efektif karena cenderung bersifat karitatif dan berisiko menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, dibutuhkan program pemberdayaan berkelanjutan sesuai Perpres No. 166 Tahun 2014 agar masyarakat miskin dapat mandiri dan kemiskinan teratasi secara efektif (Saribulan et al., 2023).

Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai upaya seperti bantuan sosial, pelatihan pemberdayaan, dan pengembangan usaha mikro dan kecil. Pemerintah mengeluarkan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berdasarkan Permensos No. 2 Tahun 2019 untuk mendorong kemandirian keluarga miskin penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). KUBE membentuk kelompok keluarga miskin yang mengelola usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan dan memanfaatkan potensi sosial-ekonomi lokal. Namun, di Kota Ambon, implementasi KUBE belum optimal karena rendahnya motivasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia kompeten, kurangnya pemahaman program, dan terbatasnya tenaga kerja terampil sehingga belum berdampak signifikan menurunkan kemiskinan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah diimplementasikan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di berbagai daerah, termasuk Kota Ambon. Namun, efektivitas program ini masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas bantuan sosial secara umum atau pemberdayaan berskala luas, sementara kajian yang fokus pada implementasi KUBE di Kota Ambon dengan pendekatan teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun masih terbatas. Terdapat kesenjangan antara tujuan program dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat dengan kondisi nyata di lapangan, seperti rendahnya motivasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala pendanaan akibat peralihan pembiayaan dari pusat ke daerah. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan KUBE di Kota Ambon agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat sasaran.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Hesri, Darmin Tuwu, dan Iwan Patta (2020) tentang Implementasi Program Beras Miskin di Desa Roko-Roko menunjukkan program belum efektif karena sosialisasi kurang dan distribusi beras sering terlambat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori Edward III, fokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berbeda dengan penelitian ini yang memakai teori Knill & Tosun dan fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE di Kota Ambon, bukan distribusi bantuan di Kabupaten Konawe Kepulauan (Hesri et al., 2020).

Penelitian Fittria Nazmi dan Asep Ajidin (2022) tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh menyatakan program secara umum baik, namun terhambat oleh dana, lemahnya pengawasan, dan data tidak valid. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teori Edward III. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan teori Knill & Tosun dan fokus pada program KUBE di Kota Ambon, bukan kebijakan umum. Penelitian sebelumnya menekankan keberhasilan program secara luas, sedangkan ini fokus pada satu program spesifik pemberdayaan masyarakat miskin (Nazmi & Ajidin, 2024).

Penelitian Ratna Rosmania dan Yolanda Maria Osok (2020) mengenai implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Distrik Makbon, Sorong, menunjukkan program dirasakan manfaatnya melalui pembangunan infrastruktur dan simpan pinjam perempuan. Metode kualitatif deskriptif dengan teori Lester dan Stewart digunakan. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan teori Knill & Tosun dan fokus pada pemberdayaan kelompok kecil melalui KUBE di Kota Ambon, sedangkan penelitian sebelumnya menekankan pemberdayaan masyarakat secara luas di Sorong (Harahap et al., 2023).

Penelitian Arie Fransyah Adrian (2022) tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bulungan menemukan program kurang efektif karena kurangnya sumber daya manusia, data tidak valid, dan anggaran terbatas. Metode kualitatif deskriptif dengan teori Edward III digunakan. Berbeda dengan penelitian ini yang memakai teori Knill & Tosun dan fokus pada program usaha bersama untuk meningkatkan kemandirian ekonomi di Kota Ambon. Penelitian sebelumnya menitikberatkan bantuan sosial untuk pendidikan dan kesehatan, sedangkan penelitian ini fokus pada pemberdayaan ekonomi produktif (Arie Fransyah Adrian, 2022).

Penelitian Theresya Wulandari Putri (2024) mengenai program ekonomi kreatif dan pengembangan UMKM di Lombok Barat menunjukkan pelaksanaan berjalan baik dengan dukungan koordinasi, pemberdayaan, dan optimalisasi potensi UMKM. Hambatan meliputi produksi, distribusi, pola pikir masyarakat, dan keterbatasan teknologi. Metode kualitatif deskriptif dengan teori Knill & Tosun digunakan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada usaha kreatif individu atau kelompok besar, penelitian ini menitikberatkan pada pembentukan kelompok usaha kecil yang dikelola bersama untuk pengentasan kemiskinan (Putri, 2024).

Penelitian Saribulan, N., Rahman, H., & Rasanjani, S. (2023) dengan Perkembangan Penelitian Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten. Penelitian ini menganalisis tren publikasi pengentasan kemiskinan di Indonesia menggunakan analisis bibliometrik dan konten dari database Scopus. Tahun 2022 mencatat publikasi terbanyak, sedangkan 2019 memiliki sitasi terbanyak. Pemerintah menjalankan upaya langsung seperti alokasi dana APBN/APBD, pembangunan ekonomi, dan program jaminan sosial, serta upaya tidak langsung melalui pengembangan pariwisata dan pertanian. Topik seperti recovery, bencana, zakat, reformasi fiskal, ekonomi inklusi, dan kemiskinan kronis masih jarang dibahas dan berpotensi sebagai tema penelitian masa depan (Saribulan et al., 2023).

Penelitian Ma'ruf (2022) menganalisis implementasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan di Kabupaten Karawang berdasarkan Perda

Nomor 2 Tahun 2014. Metode penelitian menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan 23 responden. Hasil menunjukkan peningkatan sarana pendidikan, pemerataan akses, mutu pendidikan, partisipasi sekolah, dan angka melek huruf. Meski terjadi penurunan guru dan masih ada anak putus sekolah, angka kemiskinan menurun. Implementasi kebijakan dinilai efektif dengan kolaborasi antar aktor, meski terdapat oknum implementor kurang simpatik (Ma'ruf, 2022).

Penelitian Edward dan SH (2016) membahas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Desentralisasi fiskal memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri, termasuk membuat kebijakan dan menentukan prioritas pengeluaran publik. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan berdasarkan celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah selaras dengan semangat otonomi daerah, mendorong kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik (Prof. Dr. Edward H., SH, 2016).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang ditunjukkan melalui fokus, pendekatan, serta teori yang digunakan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Miskin (Raskin), dan PNPM Mandiri yang lebih bersifat karitatif dan berorientasi pada distribusi bantuan, penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui penguatan ekonomi produktif di Kota Ambon.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Knill & Tosun, yang menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi, partisipasi, struktur kontrol, dan kapasitas administrasi dalam implementasi kebijakan. Hal ini berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang masih menggunakan teori implementasi dari Edward III.

Kebaruan lainnya terletak pada lokasi dan fokus program, di mana penelitian ini meneliti secara mendalam pelaksanaan KUBE di Kota Ambon yang hingga kini belum banyak diteliti secara akademik serta menggali faktor-faktor penghambat dan pendukung dari perspektif lokal. Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tidak menimbulkan ketergantungan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah dalam literatur kebijakan sosial dan pemberdayaan, serta menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program KUBE dalam menangani kemiskinan di Kota Ambon.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Alasan pemilihan metode ini adalah karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam menangani kemiskinan di Kota Ambon. Pendekatan deskriptif kualitatif dianggap paling sesuai untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks, serta menjelaskan secara rinci bagaimana kebijakan dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap masyarakat (John W. Creswell, 2018).

Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota Ambon dan pendamping program KUBE, karena mereka memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Informan utama adalah masyarakat penerima manfaat KUBE yang tergabung dalam kelompok usaha bersama, karena mereka adalah pihak yang langsung merasakan dampak dari program. Sementara itu, informan tambahan seperti tokoh masyarakat atau aparat kelurahan dipilih untuk melengkapi informasi dari sisi lingkungan sosial dan peran lokal dalam mendukung program (Neuman, 2014).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, yang dipilih karena merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi lokasi pelaksanaan Program KUBE. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan, dimulai dari Januari hingga Maret 2024. Selama periode tersebut, peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi guna mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam terkait implementasi program di daerah tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Menangani Kemiskinan di Kota Ambon Provinsi Maluku

Hasil pembahasan dalam penelitian diambil berdasarkan fakta dan data yang terdapat di lapangan dengan menggunakan teori implementasi Christopher Knill & Jale Tosun (2020) dalam menganalisis permasalahan. Teori implementasi ini memiliki 2 faktor utama dalam menganalisis permasalahan yaitu kriteria implementasi dan determinan yang dibagi ke dalam beberapa sub dimensi dan indikator yang akan dijelaskan dalam hasil penulisan penelitian ini:

3.1.1 Kriteria Implementasi

Kriteria implementasi adalah salah satu dimensi yang ada dalam teori implementasi Christopher Knill & Jale Tosun. Kriteria Implementasi ini terbagi menjadi dua Sub Dimensi yakni ketepatan dan kejelasan yang akan penulis jelaskan antara lain sebagai berikut :

3.1.1.1 Ketepatan

Ketepatan diartikan sebagai sejauh mana tujuan program yang ditetapkan dapat tercapai serta sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketepatan dapat dinilai dari beberapa indikator yakni:

a. Efisiensi

Efisiensi mengacu sejauh mana sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program serta kebijakan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. Efisiensi kebijakan juga sebagai acuan apakah suatu program berhasil atau tidak.

Tabel 1. Data Alokasi Anggaran Program KUBE Tahun 2023

Komponen	Jumlah
Tahun	2023
Jumlah Kelompok Penerima	8
Bantuan per Kelompok	Rp30.000.000
Total Anggaran	Rp240.000.000
Sumber Dana	APBD Kota Ambon

Sumber : Dinas Sosial Kota Ambon, 2024

Program KUBE di Ambon dinilai efisien secara administratif dana APBD Rp240 juta tersalur ke delapan kelompok, masing-masing Rp30 juta namun efisiensi hasil belum tercapai. Keterbatasan pendamping terlatih membuat sebagian kelompok gagal mengelola modal optimal, menyebabkan pemanfaatan dana dan pengembangan usaha kurang berkelanjutan. Evaluasi, pelatihan lanjutan, transparansi, dan perekrutan pendamping kompeten dibutuhkan segera oleh pemerintah.

b. Efektivitas

Program KUBE di Kota Ambon efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui usaha seperti pembuatan batako dan home industry. Namun, efektivitas ini perlu ditingkatkan agar manfaatnya lebih merata dan berkelanjutan, sesuai analisis berdasarkan teori Knill & Tosun dari wawancara pejabat Dinas Sosial.

3.1.1.2 Kejelasan

Kejelasan dalam kriteria implementasi terbagi menjadi beberapa indikator yaitu:

a. Kepatuhan

Pelaksanaan Program KUBE di Kota Ambon menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah. Banyak kelompok tidak rutin melaporkan kegiatan ke Dinas Sosial, dan terdapat anggota yang tidak aktif atau keluar kelompok. Kurangnya monitoring akibat keterbatasan anggaran memperparah kondisi ini. Penguatan pengawasan dan pendampingan diperlukan agar kepatuhan meningkat dan program berhasil optimal.

3.1.2 Determinan

Determinan merupakan salah satu dimensi dari teori implementasi Christopher Knill & Jale Tosun (2020) dimana pada dimensi ini terbagi ataa beberapa Sub Dimensi yaitu :

3.1.2.1 Instrumen Kebijakan

Instrumen kebijakan merupakan bagaimana kesesuaian berjalannya suatu program. Instrumen kebijakan memiliki indikator yaitu kesesuaian, dimana suatu program dinilai dari berjalannya suatu program apakah sudah sesuai dengan SOP ataupun belum. Kesesuaian ini mencerminkan seberapa baik pelaksanaan program di lapangan mengikuti pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh instansi pelaksana.

a. Kesesuaian

Program KUBE di Kota Ambon sudah sesuai SOP dan Permensos No. 11 Tahun 2019, berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan usaha mikro. Namun, kekurangan pelatihan dan pembinaan membatasi keberlanjutan program. Peningkatan pendampingan diperlukan agar dampak lebih maksimal dan berkelanjutan.

3.1.2.2 Desain Kebijakan

Desain kebijakan terdiri dari dua indikator utama, yaitu substansi kebijakan yang memuat isi dan tujuan kebijakan, serta proses pembuatan kebijakan yang meliputi analisis aktor, konteks, dan strategi penyusunan kebijakan untuk memastikan implementasi berjalan efektif.

a. Isi kebijakan

Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Ambon pada 20 Januari 2025 menyatakan bahwa Program KUBE dirancang untuk kelompok masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses modal. Proposal usaha yang diajukan disesuaikan dengan kapasitas usaha mereka agar bantuan yang diberikan efektif dan sesuai kemampuan kelompok dalam mengelola usaha. Berdasarkan teori Knill dan Tosun, hal ini menunjukkan bahwa substansi kebijakan KUBE sudah tepat sasaran dan berorientasi pada pemberdayaan sesuai kapasitas penerima manfaat.

b. Makna Kebijakan

Makna kebijakan mengacu pada pemahaman yang sama terhadap suatu persoalan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Ambon pada 20 Januari 2025, kebijakan program KUBE mencerminkan usaha pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan memberikan modal usaha, pemerintah berharap masyarakat dapat mengelola bantuan tersebut dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mereka. Analisis menggunakan teori Knill dan Tosun menunjukkan bahwa kebijakan ini serius dan berfokus pada pemberdayaan.

3.1.2.3 Kontrol Struktur

Kontrol struktur berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan. Kontrol struktur pemerintahan terbagi menjadi beberapa faktor yaitu:

a. Pengawasan

Kontrol pemerintahan terkait program KUBE di Kota Ambon melibatkan pengawasan oleh Dinas Sosial untuk memastikan kelompok berjalan sesuai tujuan dan mengidentifikasi kendala lapangan. Namun, menurut Kepala Dinas Sosial (20 Januari 2025), monitoring rutin terkendala anggaran sejak dana dialihkan dari Kementerian Sosial ke APBD pada 2019.

Akibatnya, monitoring belum maksimal dan belum mencakup semua kelompok. Data anggaran monitoring tahun 2024 menunjukkan biaya transportasi dan honorarium pendamping terbatas, tanpa anggaran untuk pelatihan dan evaluasi, sehingga pendampingan kelompok belum optimal. Jumlah pendamping yang terbatas memperparah kondisi ini, menghambat efektivitas program.

b. Pengendalian

Laporan kelompok KUBE sangat bergantung pada kesadaran masyarakat, karena monitoring Dinas Sosial terbatas. Banyak yang hanya fokus menerima bantuan tanpa paham pelaporan. Pendamping terbatas dan tidak menetap, sehingga pemantauan program kurang efektif.

3.1.2.4 Desain Institusi

Desain institusi Program KUBE di Kota Ambon tidak memiliki organisasi atau panitia khusus, melainkan hanya melibatkan bidang terkait untuk pelaksanaan. Hal ini menurut teori Knill dan Tosun dapat membatasi koordinasi dan pemantauan program secara terstruktur, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan.

3.1.2.5 Kapasitas administrasi

Kapasitas administrasi Program KUBE di Kota Ambon melibatkan proses koordinasi antar lembaga dengan mekanisme pengajuan proposal dari kelompok usaha yang terdaftar di DTKS. Namun, ada kendala karena sebagian penerima bantuan tidak terdaftar dalam DTKS, misalnya melalui pengajuan DPRD, sehingga sasaran belum sepenuhnya tepat.

3.1.2.6 Penerimaan sosial

Penerimaan sosial program KUBE di Kota Ambon menunjukkan usaha kelompok berjalan dan memberi pendapatan meski menghadapi kendala seperti anggota malas bekerja dan ketidaksesuaian bantuan dengan proposal. Faktor cuaca dan kurangnya dukungan dalam pengurusan label halal dan BPOM juga menghambat pemasaran produk. Kelompok mengharapkan pendampingan dan pemantauan pemerintah agar usaha berkembang dan bersaing.

3.2 Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menjalankan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam menangani kemiskinan di Kota Ambon

Berdasarkan informasi dari wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa informan terhadap permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kota Ambon Provinsi Maluku, Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program KUBE sebagai berikut :

3.2.1 Faktor Pendukung

a. Keterlibatan Pemerintah

Keterlibatan pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kota Ambon, dinilai sangat maksimal dalam mendukung kelancaran program KUBE. Berdasarkan wawancara pada 20 Januari 2025, pemerintah secara aktif memastikan kelompok-kelompok yang mengajukan proposal

mendapatkan bantuan yang sesuai dengan rencana dan kebutuhan mereka. Peran aktif ini berkontribusi besar pada keberhasilan pelaksanaan program KUBE di Kota Ambon.

b. Tingginya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam mengikuti program KUBE di Kota Ambon memang bervariasi, namun banyak anggota yang mulai menyadari pentingnya program ini. Berdasarkan wawancara dengan pendamping KUBE pada 20 Januari 2025, masyarakat memahami bahwa bantuan ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha menjalankan usaha yang sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan bantuan untuk kemajuan ekonomi keluarga mereka.

3.2.2 Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Pendanaan Program KUBE di Kota Ambon sejak 2019 dialihkan dari Kementerian Sosial ke APBD, yang berdampak pada menurunnya keberhasilan pelaksanaan program. Wawancara dengan Kepala Bagian Fakir Miskin pada 20 Januari 2025 mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, terutama jumlah dan kompetensi pendamping yang tidak memadai, menjadi kendala utama. Ketidaksesuaian antara kemampuan pendamping dengan jenis usaha kelompok menghambat pendampingan optimal, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat sulit tercapai.

b. Masalah Internal dalam Kelompok

Masalah internal dalam kelompok KUBE di Kota Ambon sering muncul, terutama terkait rendahnya motivasi sebagian anggota. Berdasarkan wawancara pendamping pada 20 Januari 2025, ada anggota yang malas bekerja meskipun hasil usaha dibagi rata, sehingga mengganggu dinamika kelompok. Analisis teori Knill dan Tosun menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada perilaku aktor pelaksana dan kapasitas organisasi. Ketimpangan kontribusi dan pembagian hasil bisa menimbulkan konflik dan menurunkan semangat kerja. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan kelompok dan peningkatan pendampingan sosial sangat diperlukan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Ambon masih menghadapi kendala signifikan pada aspek pendampingan, kepatuhan pelaporan, dan motivasi anggota kelompok. Sama halnya dengan temuan penelitian Hesri, Darmin Tuwu, dan Iwan Patta (2020) yang menyatakan bahwa program bantuan sosial seperti Program Beras Miskin belum berjalan efektif akibat kurangnya sosialisasi dan keterlambatan distribusi, penelitian ini juga menemukan bahwa program KUBE di Kota Ambon masih menghadapi kendala komunikasi dan pendampingan. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut yang fokus pada distribusi bantuan, penelitian ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat melalui usaha bersama dengan pendekatan teori Knill & Tosun.

Berbeda dengan temuan Fitria Nazmi dan Asep Ajidin (2022) yang melaporkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan secara umum di Kota Payakumbuh, penelitian ini menunjukkan bahwa program KUBE di Kota Ambon belum optimal, khususnya

dalam pengawasan dan kesesuaian bantuan, yang disebabkan oleh perbedaan konteks dan fokus program. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Theresya Wulandari Putri (2024) yang menekankan pentingnya koordinasi dan kapasitas pendamping dalam program pemberdayaan UMKM, di mana kelemahan pendampingan juga menjadi penghambat utama di Kota Ambon.

Sementara itu, penelitian Arie Fransyah Adrian (2022) yang menggunakan pendekatan serupa, menemukan kendala dalam sumber daya manusia dan validitas data dalam program PKH, sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan keterbatasan pendamping dan kendala administrasi pada program KUBE. Temuan ini juga berbeda dengan hasil penelitian Ratna Rosmania dan Yolanda Maria Osok (2020) yang fokus pada pemberdayaan masyarakat secara luas di Kabupaten Sorong melalui PNPM Mandiri. Penelitian ini lebih spesifik pada pemberdayaan kelompok kecil di Kota Ambon, yang membutuhkan strategi berbeda dalam pelaksanaan dan pengawasan.

Selain itu, penelitian Saribulan, Rahman, dan Rasanjani (2023) menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia masih perlu mengembangkan topik-topik baru seperti ekonomi inklusif dan reformasi fiskal, yang dapat menjadi pelengkap untuk memperkuat program seperti KUBE di masa depan. Penelitian Ma'ruf (2022) tentang percepatan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan di Kabupaten Karawang juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antar aktor dalam pelaksanaan kebijakan, yang sejalan dengan kebutuhan koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan KUBE di Kota Ambon.

Terakhir, penelitian Edward dan SH (2016) mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah menegaskan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah sangat penting untuk mendukung keberhasilan program seperti KUBE, yang menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Ambon dalam mengelola dana APBD untuk pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkaya literatur implementasi kebijakan pemberdayaan kemiskinan dengan menekankan pentingnya kapasitas administrasi, pendampingan yang efektif, partisipasi masyarakat, dan sinergi antar lembaga sebagai kunci keberhasilan program KUBE di Kota Ambon.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam menangani kemiskinan di Kota Ambon, dapat disimpulkan bahwa program ini telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan program telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan didukung oleh regulasi Permensos No. 11 Tahun 2019, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala. Secara efektivitas, program berhasil membantu beberapa kelompok usaha dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, namun belum menyentuh seluruh lapisan penerima manfaat secara merata. Dari sisi efisiensi administratif, alokasi anggaran dan proses distribusi bantuan sudah berjalan dengan baik, tetapi efisiensi hasil masih rendah akibat kurangnya pendampingan dan minimnya pelatihan lanjutan.

Partisipasi masyarakat cenderung pasif karena banyak kelompok dibentuk secara top-down, sementara kepatuhan terhadap pelaporan juga rendah akibat lemahnya monitoring dan keterbatasan pemahaman administratif. Desain institusi pelaksana belum kuat karena tidak adanya struktur organisasi khusus, serta kapasitas administrasi masih menghadapi tantangan terutama dalam akurasi data penerima bantuan.

Meskipun penerimaan sosial terhadap program ini cukup tinggi pada kelompok yang berhasil, terdapat pula kelompok yang mengalami hambatan internal seperti kurangnya motivasi anggota dan ketidaksesuaian bantuan dengan proposal. Faktor pendukung pelaksanaan program meliputi keterlibatan aktif pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat. Namun, hambatan terbesar datang dari keterbatasan anggaran, jumlah pendamping yang minim, serta kurangnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelibatan aktif masyarakat agar program KUBE dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Ambon.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang hanya fokus di Kota Ambon serta keterbatasan waktu dan akses dalam menggali data lebih mendalam dari semua kelompok KUBE.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan mencakup wilayah yang lebih luas, menggunakan pendekatan kuantitatif, serta mengkaji peran teknologi dan inovasi dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan KUBE.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Ambon, para informan dan pendamping Program KUBE yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penelitian. Tidak lupa, peneliti mengapresiasi keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan moral. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al Baihaqqi, R. F. F., Susilowati, E. ., & Nainggolan, A. (2024). The implementation of the Joint Venture Group called “Maju Bersama Satu” in poverty reduction in Singkalanyar, Prambon Sub-district, Nganjuk District. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 6(1), 39–45.
- Arie Fransyah Adrian. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–8.
- Arief, M. A. (2016). Pengelolaan Proyek Implementasi ERP pada Sistem Laporan Keuangan Parkir di PT Harfan Tri Megah (Edugate). *Skripsi*, 1–23.
- BPS. (2023). Statistik Indonesia 2023.
- BPS Maluku. (2023). Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku
- Burnama, T. S. (2024). Evaluation Of The Implementation Of The Joint Business Group (Kube) Program Policy In The Coastal Area Of East Kotawaringin Regency. *Anterior Jurnal*, 23(2), 57–61.

- Harahap, A. A., Rokan, M. K., & ... (2023). Implementation of Community Empowerment to Overcome Poverty through the Mandiri National Community Empowerment Program (PNPM) Viewed from an Islamic *International Journal*, 4(4), 1946–1958. <https://journal.yrpiaku.com/index.php/ijedr/article/view/4409%0Ahttps://journal.yrpiaku.com/index.php/ijedr/article/download/4409/2470>
- Hariadi, M. (2024). Kolaborasi Pemerintahan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–18.
- Hesri, H., Tuwu, D., & Patta, I. (2020). Implementasi Program Beras Miskin Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan (Studi Di Desa Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan). *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 1(1), 61. <https://doi.org/10.52423/jkps.v1i1.10874>
- Jayadi, T., & Meilvidiri, W. (2019). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) And Poverty Level Performance In Sulawesi and Kalimantan Areas. In *International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)*, 383(Icss), 66–69.
- John W. Creswell, J. D. C. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*.
- Ma'ruf, M. (2022). Implementation of the Poverty Reduction Acceleration Policy in Karawang Regency, Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 14(2), 77–91. <https://doi.org/10.33701/jtp.v14i2.2715>
- Nazmi, F., & Ajidin, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Payakumbuh. *Journal Publicuho*, 7(3), 1135–1143. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.468>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*.
- Pratama, A. Y. (2023). Kinerja aparatur dinas sosial dalam mengurangi angka kemiskinan di kota banda aceh provinsi aceh. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–11.
- Prof. Dr. Edward H., SH, M. H. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, XLII(1), 1–10.
- Putri, T. W. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Ekonomi Kreatif Pengembangan Umkm Pada Desa Wisata Di Kabupaten Lombok Barat. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–20.
- Saribulan, N., Rahman, H., & Rasanjani, S. (2023). Perkembangan Penelitian Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 309–321. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.62375>
- Setitit, F. K. (2024). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Dalam Penangan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–14.